

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2024

Kantor UPBU Dabo

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor UPBU Dabo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor UPBU Dabo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Dabo, 1 Mei 2025

Kepala Kantor

Mustaji, SE.

NIP. 19750514 199704 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	18
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Piutang Bukan Pajak	
C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.4 Persediaan	
C.5 Persediaan yang Belum Diregister	
C.6 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.7 Tanah	
C.8 Tanah Belum Diregister	
C.9 Peralatan dan Mesin	
C.10 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.11 Gedung dan Bangunan	
C.12 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.14 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.15 Aset Tetap Lainnya	
C.16 Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	

C.19	Aset Lain-lain	
C.20	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.21	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.22	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.23	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.24	Uang Muka dari KPPN	
C.25	Ekuitas	
C.26	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	23
D.1	Pendapatan Perpajakan	
D.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.3	Beban Pegawai	
D.4	Beban Persediaan	
D.5	Beban Barang dan Jasa	
D.6	Beban Pemeliharaan	
D.7	Beban Perjalanan Dinas	
D.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.9	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.10	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.11	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.12	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.13	Pos Luar Biasa	
D.14	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
E.7	Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	29
F.1	Kejadian-Kejadian Setelah Tanggal Neraca	
F.2	Pengungkapan Lainnya	
VI.	Lampiran dan Daftar	30

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor UPBU Dabo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Dabo, 1 Mei 2025

Kepala Kantor

Mustaji, SE.

NIP. 19750514 199704 1 001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kantor UPBU Dabo Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp215,013,368 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp215,013,368 atau mencapai 85.44 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp251,656,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp68,395,648,501 atau mencapai 95.67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp71,489,694,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp525,392,031,105 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp278,967,682; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp522,966,990,069 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2,146,073,354.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1,753,360,412 dan Rp523,638,670,693

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp217,403,406 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp70,556,536,689 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-70,339,133,283, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-70,339,133,283.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp525,797,159,639, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-70,339,133,283 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 9,204 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 68,180,635,133 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp523,638,670,693

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

DAFTAR TABEL

- 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
- 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023
- 3 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023
- 4 Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023
- 5 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023
- 6 Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023
- 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024
- 8 Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023
- 9 Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023
- 10 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2024
- 11 Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023
- 12 Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023
- 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023
- 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023
- 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023
- 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023
- 17 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	I	LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAMPIRAN	II	NERACA
LAMPIRAN	III	LAPORAN OPERASIONAL
LAMPIRAN	IV	LAPORAN EKUITAS

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor UPBU Kelas III Dabo

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

Kantor UPBU Kelas III Dabo didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan di Jalan Garuda, kab. Lingga, Kepulauan Riau.

Kantor UPBU Kelas III Dabo mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo Singkep berkomitmen dengan visi “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas”.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor UPBU Dabo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor UPBU Dabo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA***(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO***(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan belum melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh belum adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	251,656,000	251,656,000
Jumlah Pendapatan	251,656,000	251,656,000
Belanja		
Belanja Pegawai	2,924,642,000	3,612,027,000
Belanja Barang	55,530,284,000	55,530,284,000
Belanja Modal	12,347,383,000	12,347,383,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	70,802,309,000	71,489,694,000

Realisasi Pendapatan
Rp215,013,368

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp215,013,368 atau mencapai 85.44 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp251,656,000. Pendapatan Kantor UPBU Dabo terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp215,013,368. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Kenaikan PNBP ditahun 2024 dikarenakan adanya penambahan rute dan frekuensi subsidi angkutan udara perintis dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	251,656,000	215,013,368	85.44
Jumlah	251,656,000	215,013,368	85.44

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 16.95 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	215,013,368	183,857,465	16.95
Jumlah	215,013,368	183,857,465	16.95

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

*Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp215,013,368*

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp215,013,368 dan Rp183,857,465. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 16.95 dari TA 2023 Penambahan PNBPN dikarenakan penambahan Rute dan Frekuensi pada TA 2024. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	215,013,368	183,857,465	16.95
Jumlah	215,013,368	183,857,465	16.95

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	208,268,180	176,981,465	17.68
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,666,000	6,876,000	(3.05)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	79,188	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Jumlah	215,013,368	183,857,465	16.95

B.2 Belanja

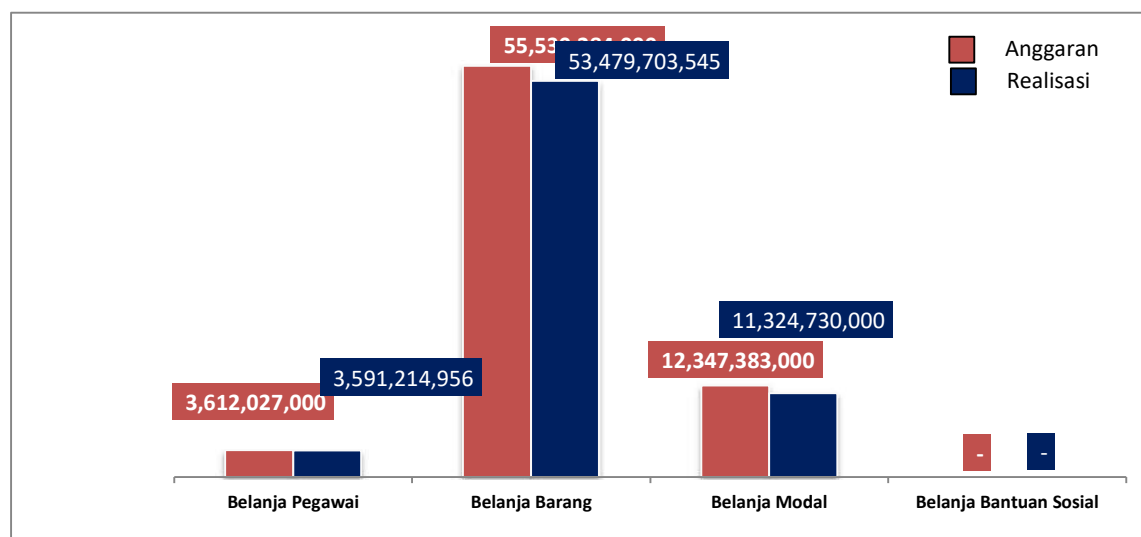
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp68,395,648,501 atau 46,47 % dari anggaran belanja sebesar Rp.73.367.309.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	2,924,642,000	3,591,214,956	122.79
Belanja Barang	55,530,284,000	53,479,703,545	96.31
Belanja Modal	14,912,383,000	11,324,730,000	75.94
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	73,367,309,000	68,395,648,501	93.22

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 58.26% Belanja barang mengalami kenaikan karena ada usulan pembukaan blokir Automatic Adjustment pada Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN) , belanja pegawai mengalami kenaikan

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	3,591,214,956	3,145,102,470	14.18
Belanja Barang	53,479,703,545	33,071,062,169	61.71
Belanja Modal	11,324,730,000	7,001,458,000	61.75
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	68,395,648,501	43,217,622,639	58.26

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3,591,214,956 dan Rp3,145,102,470. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 14.18 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena penambahan pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,281,257,420	1,097,988,540	16.69
Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,741	23,273	(2.29)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	79,793,220	78,048,440	2.24
Belanja Tunj. Anak PNS	30,152,886	27,875,066	8.17
Belanja Tunj. Struktural PNS	8,100,000	7,560,000	7.14
Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,520,000	16,680,000	(6.95)
Belanja Tunj. PPh PNS	4,400,581	45,000	9,679.07
Belanja Tunj. Beras PNS	79,951,680	80,096,520	(0.18)
Belanja Uang Makan PNS	241,087,000	250,486,000	(3.75)
Belanja Tunjangan Umum PNS	69,110,000	65,625,000	5.31
Belanja Uang Lembur	65,000,000	30,600,000	112.42
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,716,820,100	1,492,369,190	15.04
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	3,591,215,628	3,147,397,029	14.10
Pengembalian Belanja Pegawai	672	2,294,559	(99.97)
Jumlah Belanja	3,591,214,956	3,145,102,470	14.18

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp53,479,703,545 dan Rp33,071,062,169. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 61.71% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Terdapat Kenaikan pada belanja barang non operasional dikarenakan adanya penambahan jumlah frekuensi dan rute penerbangan perintis TA 2024. sedangkan kenaikan pada

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	5,427,965,000	6,885,398,000	(21.17)
Belanja Barang Non Operasional	37,731,388,265	18,403,589,169	105.02
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	250,000,000	306,382,000	(18.40)
Belanja Jasa	740,901,280	575,576,900	28.72
Belanja Pemeliharaan	8,805,356,000	6,561,092,100	34.21
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	524,093,000	339,024,000	54.59
	-	-	-
	-	-	-

Jumlah Belanja Kotor	53,479,703,545	33,071,062,169	61.71
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	53,479,703,545	33,071,062,169	61.71

Realisasi Belanja Modal
Rp11,324,730,000

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11,324,730,000 dan Rp7,001,458,000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 61.75% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh tahun 2020 hanya ada belanja modal peralatan mesin untuk alat-alt kantor.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	10,628,130,000	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	696,600,000	6,602,280,000	(89.45)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	399,178,000	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	11,324,730,000	7,001,458,000	61.75
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	11,324,730,000	7,001,458,000	61.75

Realisasi Belanja Modal
Tanah
Rp10,628,130,000

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10,628,130,000 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0.00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	10,628,130,000	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	10,628,130,000	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	10,628,130,000	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp696,600,000

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp696,600,000 dan Rp6,602,280,000, mengalami penurunan sebesar 89.45 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	696,600,000	6,602,280,000	(89.45)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	696,600,000	6,602,280,000	(89.45)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	696,600,000	6,602,280,000	(89.45)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp399,178,000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100.00% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	399,178,000	(100.00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	399,178,000	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	399,178,000	(100.00)

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp278,293,148 dan Rp275,903,110. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	273,762,427	273,762,427
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,530,721	2,140,683
Jumlah	278,293,148	275,903,110

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1,391,466 dan Rp1,379,515. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2,066,000 dan Rp834,000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	2,066,000	834,000
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	2,066,000	834,000

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.6 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

Piutang Bukan Pajak
Rp278,293,148

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak
Rp1,391,466

Persediaan
Rp2,066,000

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

Piutang Jangka Panjang
lainnya Rp0

Tanah
Rp168,417,450,000

C.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp168,417,450,000 dan Rp168,417,450,000. Nilai Tanah tersebut belum ada penambahan aset tanah dan masih seperti di tahun sebelumnya. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	168,417,450,000
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	168,417,450,000

Tanah Belum Diregister
Rp0

C.8 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp52,340,251,513

C.9 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp52,340,251,513 dan Rp54,013,849,513. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	54,013,849,513
Saldo per 31 Desember 2024	54,013,849,513
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(38,510,765,009)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	15,503,084,504

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.10 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp99,829,373,019

C.11 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp99,829,373,019 dan Rp100,496,985,019. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	100,496,985,019
	-
Saldo per 31 Desember 2024	100,496,985,019
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(16,955,459,037)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	83,541,525,982

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.12 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp148,766,798,482

C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.148,766,798,482 dan Rp.148,766,798,482. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	148,766,798,482
	-
Saldo per	148,766,798,482
Akumulasi Penyusutan s.d.	(107,397,744,696)
Nilai Buku per	41,369,053,786

C.14 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.15 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.216,477,085,797 dan Rp.205,848,955,797. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	205,848,955,797
	-
Saldo per 31 Desember 2024	205,848,955,797
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	205,848,955,797

C.16 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0.

C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	-

C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp162,863,968,742 dan Rp152,022,236,767. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	52,340,251,513	(38,510,765,009)	13,829,486,504
2	Gedung dan Bangunan	99,829,373,019	(16,955,459,037)	82,873,913,982
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	148,766,798,482	(107,397,744,696)	41,369,053,786
4	Aset Tetap Lainnya	216,477,085,797	-	216,477,085,797
Akumulasi Penyusutan		517,413,508,811	(162,863,968,742)	354,549,540,069

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Lain-lain
Rp3,430,854,000

C.19 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp3,430,854,000 dan Rp396,044,000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	396,044,000
	-
Saldo per 31 Desember 2024	396,044,000
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	(3,038,141,058)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	(2,642,097,058)

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.20 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 3,038,141,058

C.21 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp3,038,141,058 dan Rp396,044,000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	3,430,854,000	(3,038,141,058)	392,712,942
-	-	-	-
Total	3,430,854,000	(3,038,141,058)	392,712,942

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp1,753,360,412

C.22 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1,753,360,412 dan Rp4,141,763,326. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

utang PT. Asi Pudjiastuti Aviation

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.23 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	-	-
Total	-	-

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Ekuitas
Rp523,638,670,693

C.25 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp523,638,670,693. dan Rp525,797,159,639. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 26 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

URAIAN	2024	2023	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp217,403,406

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp217,403,406 dan Rp177,121,453. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 22.74. Hal tersebut disebabkan oleh sudah tidak adanya pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	210,658,218	170,245,453.00	23.74
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,666,000	6,876,000.00	(3.05)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	79,188	-	-
Jumlah	217,403,406.00	177,121,453.00	22.74

Beban Pegawai
Rp3,591,214,956

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3,591,214,956 dan Rp3,145,102,470.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 14.18 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh bertambahnya pegawai. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	1,281,257,420	1,097,988,540	16.69
Beban Pembulatan Gaji PNS	22,069	23,058	(4.29)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	79,793,220	78,048,440	2.24
Beban Tunj. Anak PNS	30,152,886	27,875,066	8.17
Beban Tunj. Struktural PNS	8,100,000	7,560,000	7.14
Beban Tunj. Fungsional PNS	15,520,000	16,680,000	(6.95)
Jumlah	3,591,214,956	3,145,102,470	14.18

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,326,018,000 dan Rp910,300,100

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 45.67 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh hal ini dikarenakan oleh penurunan beban persediaan yang tidak banyak perubahan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	1,237,668,000	354,748,000	248.89
Beban Persediaan bahan baku	88,350,000	550,302,100	(83.95)
Beban Persediaan Lainnya	-	5,250,000	(100.00)
Jumlah Beban Persediaan	1,326,018,000.00	910,300,100	45.67

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp43,903,254,545 dan Rp25,864,564,069.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 69.74 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Kenaikan dikarenakan penambahan rute dan frekuensi perintis TA 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	5,006,006,000	6,361,656,000	(21.31)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	50,000,000	115,200,000	(56.60)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	175,248,000	338,632,000	(48.25)
Beban Bahan	470,001,000	81,980,000	473.31
Beban Barang Non Operasional Lainnya	37,252,027,265	18,321,609,169	103.32
Beban Langganan Listrik	578,443,580	539,970,000	7.13
Beban Barang Operasional Lainnya	184,711,000	63,910,000	189.02
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12,625,700	24,000,000	(47.39)
Beban Honor Output Kegiatan	9,360,000	-	-
Beban Langganan Telepon	-	11,606,900	(100.00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	6,000,000	100.00
Beban Jasa Konsultan	149,832,000	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3,000,000	-	-
Jumlah	43,903,254,545	25,864,564,069.00	69.74

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7,728,106,000 dan Rp5,961,510,000.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 29.63 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh hal ini dikarenakan oleh kenaikan dan juga penurunan beban pemeliharaan Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,248,455,000	942,000,000	244.85
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,030,685,000	2,225,830,000	(53.69)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2,176,921,000	27,732,000	7,749.85
Beban Pemeliharaan Jaringan	284,000,000	2,765,548,000	(89.73)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	400,000	(100.00)
Jumlah	7,728,106,000	5,961,510,000	29.63

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp524,093,000 dan Rp339,024,000

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 54.59 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	479,959,000	261,324,000	83.66
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	44,134,000	77,700,000	(43.20)
	-	-	-
Jumlah	524,093,000.00	339,024,000	54.59

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp13,483,829,033

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13,483,829,033 dan Rp13,862,176,015.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,217,317,097	3,604,312,679	(10.74)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,465,624,286	2,476,611,333	(0.44)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7,399,450,043	7,399,450,043	-
Beban Penyusutan Irigasi	246,721,587	246,721,587	-
Beban Penyusutan Jaringan	135,080,373	135,080,373	-
Jumah Penyusutan	13,483,829,033	13,862,176,015	(2.73)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	13,483,829,033	13,862,176,015	(2.73)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp21,155

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp21,155 dan Rp-848,466

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	21,155	(848,466)	(102)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Jumlah	21,155.00	(848,466)	(102)

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Rp0

D.10 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

D.14 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp525,797,159,639.00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.525,797,159,639.00 dan Rp.532,665,705,039.00

Defisit LO
Rp.70,339,133,283.00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.70,339,133,283.00 dan Rp.49,904,706,735.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.9,204 dan Rp.2,396,161 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0.00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Rp9,204

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.9,204 dan Rp.2,396,161. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
---------------	---------------

Koreksi Lainnya	9,204
-	-
Jumlah	9,204.0

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.68,180,635,133 dan Rp.43,033,765,174. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	68,395,648,501
Diterima dari Entitas Lain	(215,013,368)
Jumlah	68,180,635,133

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 68,395,648,501, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 215,013,368

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2024

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.523,638,670,693.00 dan Rp.525,797,159,639.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Tahun 2023 telah terjadi Revisi DIPA Sebanyak 9 kali. Revisi Tersebut terdiri dari revisi Automatic Adjustment, revisi pembukaan blokir, revisi penambahan belanja pegawai, revisi penambahan belanja barang, dan beberapa revisi rencana penarikan halaman III DIPA. Pada bulan november 2023 terdapat penambahan pegawai sebanyak 2 orang, Belanja barang mengalami kenaikan karena ada usulan pembukaan blokir Automatic Adjustment pada Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN) , belanja pegawai mengalami kenaikan karena ada penambahan pegawai dari Jalur Pola Pembibitan sebanyak 2 orang dan perubahan status kawin pegawai sehingga direvisi 2 kali

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo Singkep Nomor : KP.004/2/15/UPBU.DABO-2024 Tentang Perubahan Susunan Pengelola Anggaran Tahun 2024 Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo.

Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor UPBU Kelas III Dabo pada tanggal 21 Maret 2024.

Kuasa Pengguna Anggaran	: MUSTAJI, SE. NIP. 19750514 199704 1 001
Pejabat Pembuat Komitmen	: NANANG NOVIANTO SAPUTRO, S.I.Kom NIP. 19781227 200003 1 002
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: YODHIE HARJILOV, Amd. NIP. 19771121 200212 1 0003
Bendahara	
Bendahara Pengeluaran	: DAHRYANA NIP. 19750413 200212 2 002
Bendahara Penerimaan	: ASHARY TRY KURNIAPUTRA NIP. 19900429 201012 1 005

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	217,403,406	177,121,453
Jumlah Pendapatan		217,403,406	177,121,453
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	3,591,214,956	3,145,102,470
Beban Persediaan	D.4	1,326,018,000	910,300,100
Beban Barang dan Jasa	D.5	43,903,254,545	25,864,564,069
Beban Pemeliharaan	D.6	7,728,106,000	5,961,510,000
Beban Perjalanan Dinas	D.7	524,093,000	339,024,000
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	13,483,829,033	13,862,176,015
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	21,155	(848,466)
Jumlah Beban		70,556,536,689	50,081,828,188
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(70,339,133,283)	(49,904,706,735)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(70,339,133,283)	(49,904,706,735)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(70,339,133,283)	(49,904,706,735)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	525,797,159,639	532,665,705,039
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(70,339,133,283)	(49,904,706,735)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	9,204	2,396,161
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	9,204	2,396,161
Jumlah		9,204	2,396,161
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	68,180,635,133	43,033,765,174
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2,158,488,946)	(6,868,545,400)
EKUITAS AKHIR	E.6	523,638,670,693	525,797,159,639

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

U R A I A N	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	251,656,000	215,013,368	85.44	183,857,465
JUMLAH PENDAPATAN		251,656,000	215,013,368	85.44	183,857,465
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	3,612,027,000	3,591,214,956	99.42	3,145,102,470
Belanja Barang	B.2.2	55,530,284,000	53,479,703,545	96.31	33,071,062,169
Belanja Modal	B.2.3	12,347,383,000	11,324,730,000	91.72	7,001,458,000
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		71,489,694,000	68,395,648,501	95.67	43,217,622,639

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

U R A I A N	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	278,293,148	275,903,110
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	(1,391,466)	(1,379,515)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.14	-	-
Persediaan	C.15	2,066,000	834,000
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		278,967,682	275,357,595
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	168,417,450,000	168,417,450,000
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	52,340,251,513	54,013,849,513
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	99,829,373,019	100,496,985,019
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	148,766,798,482	148,766,798,482
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	216,477,085,797	205,848,955,797
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(162,863,968,742)	(152,022,236,767)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		522,966,990,069	525,521,802,044
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	1,753,360,412	4,141,763,326

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	3,430,854,000	396,044,000
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(3,038,141,058)	(396,044,000)
Jumlah Aset Lainnya		2,146,073,354	4,141,763,326
JUMLAH ASET		525,392,031,105	529,938,922,965
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	1,753,360,412	4,141,763,326
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1,753,360,412	4,141,763,326
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		1,753,360,412	4,141,763,326
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	523,638,670,693	525,797,159,639
JUMLAH EKUTAS		523,638,670,693	525,797,159,639
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		525,392,031,105	529,938,922,965